

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Kondisi geografis wilayah Kab. Bandung yang terletak pada koordinat 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kab. Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kab. Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kab. Bandung Barat dan Kab. Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kab. Garut.

Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah kabupaten Bandung antara lain Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Kertasari, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Soreang.

1.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

a. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dengan berorientasi global.

b. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.
2. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika, etika dan historika.
3. Meningkatkan pencitraan publik melalui tata kelola, transparansi dan akuntabilitas.

1.1.2 Tujuan

Berdasarkan misi yang diemban maka disusunlah tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal), pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan
4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
6. Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transparan dan akuntabel
7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional.

1.1.3 Strategi

Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2011-2015 pada tingkat nasional ialah penguatan pelayanan kelembagaan. Oleh karena itu, mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2015, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan, di samping merintis wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen 12 tahun). Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, terutama dalam:

1. Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan.
2. Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan.
3. Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan.
4. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
5. Partisipasi masyarakat.

1.1.4 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan
3. Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dilaksanakannya otonomi daerah dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah yang diikuti dengan pelimpahan wewenang pengelolaan dana telah menghasilkan perubahan yang signifikan yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem keuangan pusat maupun daerah. Pada tahun 2000 terbitlah Peraturan Pemerintah No 105 yang berisikan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilanjutkan dengan turunnya Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, PP nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga yang mengimplikasikan adanya perubahan sistem penganggaran yang berlaku yaitu dari sistem penganggaran tradisional atau line item budgeting ke sistem penganggaran berbasis kinerja.

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematisasi anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)

Penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (mengacu pada pasal 7 ayat 1 PP nomor 21 tahun 2004). Penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dengan menetapkan rencana strategis yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Penetapan target kinerja pada program terlihat dari indikator *outcome*, sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari indikator output nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan kegiatan dalam rangka belanja investasi. Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan input sebagai dasar dari perhitungan standar biaya. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>)

Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di mulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Selanjutnya diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu menetapkan RKPD, dan melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2012 disebutkan bahwa Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait erat dengan isu strategis pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung. Isu strategis ini, adalah "Kualitas Pendidikan masih relatif rendah, yang disebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses pelayanan pendidikan, belum tercapainya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik" (LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2012 : 9). Keadaan ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung masih belum baik karena banyaknya keluhan dan permasalahan yang dirasakan masyarakat. Keadaan ini bisa muncul karena banyak hal, salah satunya adalah kurang tepatnya tujuan dan sasaran dari program kerja yang disusun sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini seharusnya bisa diatasi dengan berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang di dalamnya telah diatur tentang aspirasi masyarakat dalam penyusunan program kerja pemerintah, serta adanya indikator kinerja yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung"**.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
- b. Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
- c. Bagaimana pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

- a. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
- b. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
- c. Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam kepada penulis mengenai anggaran berbasis kinerja dan kinerja instansi pemerintahan serta mengetahui bentuk aplikatifnya di kehidupan nyata.

2. Bagi pemerintah / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai kinerja instansi pada saat dilaksanakan anggaran berbasis kinerja

3. Bagi kalangan akademis

Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang kajian yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bnadung, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka dan lingkup penelitian

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Sub bab tinjauan pustaka penelitian meliputi rangkuman teori dan penelitian teori.

Bab III Metode penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran terhadap beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bnadung.